



IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH TUAH SEKATA KABUPATEN PELALAWAN

Rizka Ananda Putri, Adianto

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Riau

Abstrak

Implementasi Good Corporate Governance pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) masih menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan berbasis digital yang belum sepenuhnya optimal. Kondisi tersebut menuntut adanya evaluasi menyeluruh dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Good Corporate Governance pada Perumda Tuah Sekata Kabupaten Pelalawan. Serta mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi dalam penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan berbasis digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang terdiri dari pihak manajemen, pegawai, dan pelanggan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Good Corporate Governance telah diterapkan berdasarkan kelima prinsip tersebut, namun belum sepenuhnya optimal. Pada aspek transparansi, informasi layanan telah disediakan tetapi penyampaiannya masih belum cepat dan merata; pada aspek akuntabilitas, struktur organisasi dan pelaporan sudah berjalan namun masih terdapat kendala dalam pengelolaan piutang dan pengendalian internal, pada aspek responsibilitas, perusahaan telah menjalankan kewajiban pelayanan listrik meskipun masih terdapat keluhan terkait gangguan dan pemadaman; pada aspek independensi, perusahaan berupaya menjalankan operasional secara profesional dan bebas intervensi; serta pada aspek kewajaran, pelayanan telah diberikan secara adil meskipun respons dan akses informasi masih perlu ditingkatkan. Adapun faktor pendukung meliputi struktur organisasi yang jelas, komitmen manajemen, dan dukungan regulasi, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan sistem informasi, infrastruktur, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan.

Kata Kunci: Good Corporate Governance, Transparansi, Akuntabilitas, Perusahaan Umum Daerah Tuah Sekata.

PENDAHULUAN

Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu daerah di Provinsi Riau yang mengalami pertumbuhan ekonomi cukup pesat, terutama melalui sektor perkebunan, industri hilir, dan aktivitas perdagangan (Rusli et al., 2022). Wilayah ini menjadi salah satu pusat produksi kelapa sawit, sehingga pergerakan ekonomi masyarakat sangat dipengaruhi oleh ketersediaan energi listrik. Aktivitas usaha mikro, UMKM, fasilitas publik, hingga kegiatan rumah tangga bergantung pada kontinuitas penyediaan listrik sebagai infrastruktur dasar (Pratama & Wijaya, 2022).

Perumda Tuah Sekata hadir sebagai penyedia layanan listrik daerah untuk wilayah Pangkalan Kerinci dan sekitarnya yang tidak sepenuhnya terjangkau jaringan PLN. Perumda Tuah Sekata dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan sebagai respons atas keterbatasan layanan listrik PLN sejak Tahun 2004.

Perusahaan ini menjalankan fungsi operasional sebagai penyalur daya listrik dari sumber, yaitu PT Riau Prima Energi sebagaimana tertuang dalam *Memorandum of Understanding* (MOU) yang telah disepakati oleh kedua pihak. Target utama operasional perusahaan tidak semata-mata mengejar keuntungan, tetapi memastikan masyarakat memperoleh akses energi listrik secara berkelanjutan. Perumda Tuah Sekata saat ini mengelola dua unit usaha strategis, yaitu distribusi energi listrik dan distribusi pangan (beras), yang ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan pokok masyarakat Kabupaten Pelalawan.

Pendirian unit usaha ini bertujuan untuk memastikan kesinambungan dalam pelayanan dasar serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Wilayah kerja distribusi listrik Perumda Tuah Sekata meliputi Kecamatan Pangkalan Kerinci, yang mencakup Kelurahan Kerinci Barat, Kelurahan Kerinci Kota, Kelurahan Kerinci Timur, Desa Makmur, Desa Rantau Baru, serta Desa Kuala Terusan. Selain itu, cakupan pelayanan listrik juga meluas ke Kecamatan Pelalawan, termasuk Kelurahan Pelalawan, Desa Sering, dan Desa Lalang Kabung, serta wilayah Desa Simpang Perak Jaya di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak.

Dalam konteks tersebut, dengan menjalankan fungsi distribusi daya dari PT Riau Prima Energi (PT RPE) berdasarkan *Memorandum of Understanding* yang telah disepakati kedua pihak. Pada Oktober 2025, Perumda Tuah Sekata melayani 13.335 pelanggan yang terdiri dari segmen pemerintah, rumah tangga, sosial, dan bisnis.

Ketersediaan listrik yang andal merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas layanan publik dan daya saing suatu daerah. Kondisi ini menciptakan ruang bagi BUMD kelistrikan daerah untuk mengambil peran strategis sebagai penyedia energi alternatif yang melengkapi jaringan nasional. Dalam konteks ini, Perumda Tuah Sekata memiliki posisi yang krusial sebagai satu-satunya penyedia layanan

listrik bagi sebagian besar wilayah Pangkalan Kerinci yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem distribusi PLN.

Sebagaimana banyak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lainnya, Perumda Tuah Sekata menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten. Tantangan tersebut meliputi kurangnya pemahaman manajemen dan pegawai terhadap GCG, keterbatasan SDM profesional, intervensi politik dalam pengambilan keputusan strategis, serta struktur organisasi dan sistem pengendalian internal yang belum optimal (Nurohimah et al., 2023). Kondisi ini terdokumentasi melalui berbagai laporan media dalam kurun 2022–2025, antara lain pemadaman listrik hampir setiap hari pada 2022, dan tunggakan pembayaran pelanggan yang mencapai lebih dari Rp2 miliar pada April 2024 (Benteng Melayu.com, 2024). Rangkaian permasalahan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kewajiban normatif yang diatur regulasi dan praktik nyata pengelolaan perusahaan.

Secara regulatif, operasional Perumda Tuah Sekata berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 5 Tahun 2020 yang telah diperbarui melalui Perda Nomor 9 Tahun 2023, serta Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 14 Tahun 2022. Kepatuhan terhadap kerangka regulasi ini bukan sekadar formalitas hukum, melainkan prasyarat mendasar bagi terwujudnya pelayanan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi GCG pada BUMD di daerah masih menghadapi kendala struktural yang signifikan,

terutama terkait kapasitas SDM dan budaya organisasi (Nanda et al., 2024). Sementara itu, pada perusahaan swasta yang berhasil menerapkan GCG, terbukti terdapat dampak positif terhadap kinerja keuangan (Sendjaja et al., 2024). Kedua temuan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan implementasi GCG sangat bergantung pada komitmen manajemen dan kualitas sumber daya internal organisasi.

Berbeda dari penelitian sebelumnya, kajian ini berfokus pada implementasi GCG di Perumda Tuah Sekata dengan pendekatan yang lebih kontekstual, yakni mengaitkan penerapan prinsip GCG dengan permasalahan operasional nyata yang dihadapi perusahaan. GCG tidak hanya dilihat dari sisi formalitas penerapan prinsip, tetapi juga dari dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik. Secara akademik, kajian mengenai implementasi GCG pada BUMD di sektor kelistrikan daerah masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *Good Corporate Governance* pada Perumda Tuah Sekata Kabupaten Pelalawan serta mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung dalam penerapannya.

METODE PENELITIAN

Pada kajian penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang memiliki sifat deskriptif dengan pendekatan fenomenologi. Bersifat deskriptif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tuah Sekata Kabupaten Pelalawan.

Penelitian deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti menjelaskan proses pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajiban

(*fairness*) dalam pengelolaan perusahaan daerah.

Pendekatan fenomenologi dipilih untuk menggali esensi pengalaman dan kesadaran para informan dalam menjalankan prinsip-prinsip GCG di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tuah Sekata Kabupaten Pelalawan. Melalui pendekatan ini, peneliti tidak hanya memaparkan prosedur administratif, tetapi juga berupaya menangkap bagaimana individu di dalam perusahaan tersebut memaknai dan menginternalisasi nilai-nilai tata kelola dalam aktivitas operasional mereka.

Informan berjumlah 10 orang yang dipilih secara purposive sampling, terdiri dari informan internal (manajemen dan pegawai Perumda Tuah Sekata) dan informan eksternal (pelanggan). Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan pernyataan informan internal dan eksternal, serta triangulasi metode melalui pencocokan antara data wawancara, hasil observasi, dan temuan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan NVivo 12 dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam NVivo 12, dikembangkan struktur node yang mencakup Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat untuk masing-masing prinsip TARIF, sehingga memungkinkan analisis komparatif yang sistematis antar dimensi. Visualisasi *word cloud* dan *project map* dari NVivo 12 digunakan untuk memperkuat penyajian data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi GCG pada Perumda Tuah Sekata belum berjalan secara optimal apabila ditinjau dari kelima prinsip TARIF.

1. Transparansi

Penerapan prinsip transparansi pada Perumda Tuah Sekata masih menghadapi berbagai keterbatasan yang berdampak langsung terhadap kepercayaan publik. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa informasi mengenai jadwal dan penyebab gangguan atau pemadaman listrik kerap tidak disampaikan secara proaktif kepada pelanggan, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan ketidakpuasan di tengah masyarakat (Zatira et al., 2023). Keterbatasan ini bersumber dari belum optimalnya digitalisasi sistem informasi perusahaan, yang seharusnya menjadi infrastruktur utama dalam mendorong keterbukaan informasi kepada publik secara real-time dan terstruktur. Tanpa dukungan platform digital yang memadai, arus informasi antara perusahaan dan pemangku kepentingan menjadi terhambat, dan asimetri informasi pun sulit diatasi.

Hasil analisis NVivo 12 transkrip wawancara enam informan pelanggan menunjukkan bahwa keluhan terbanyak berkaitan dengan ketidaktahuan pelanggan mengenai penyebab dan estimasi durasi pemadaman. Sebagaimana dikemukakan oleh Zatira et al. (2023), ketidakterbukaan informasi pada BUMD sektor utilitas berkorelasi langsung dengan menurunnya kepercayaan publik terhadap perusahaan. Keterbatasan digitalisasi sistem informasi menjadi kendala utama, mengingat Perumda Tuah Sekata belum memiliki aplikasi mobile atau portal web resmi yang dapat diakses pelanggan secara mandiri untuk memperoleh informasi layanan terkini.

Faktor pendukung prinsip transparansi meliputi adanya komitmen pimpinan untuk meningkatkan keterbukaan informasi, tersedianya media komunikasi dasar seperti nomor kontak pengaduan dan papan informasi, serta regulasi Perda Nomor 9 Tahun 2023 yang secara eksplisit mewajibkan

publikasi informasi layanan kepada publik. Sedangkan faktor penghambatnya adalah keterbatasan anggaran untuk pengembangan sistem informasi digital, rendahnya literasi digital sebagian pegawai operasional, dan belum adanya standar prosedur operasional (SOP) baku untuk manajemen informasi publik yang terstruktur dan konsisten.

2. Akuntabilitas

Penerapan prinsip akuntabilitas, sistem pertanggungjawaban internal belum sepenuhnya terstruktur. Laporan kinerja perusahaan belum secara konsisten dipublikasikan kepada pemangku kepentingan, dan mekanisme evaluasi kinerja pegawai belum diterapkan secara sistematis.

3. Responsibilitas

Prinsip responsibilitas, Perumda Tuah Sekata telah berupaya memenuhi kewajiban layanan publik sesuai mandat regulasi, namun frekuensi gangguan layanan yang masih tinggi menunjukkan adanya kesenjangan antara standar layanan yang ditetapkan dengan realisasi di lapangan.

4. Independensi

Prinsip independensi, pengambilan keputusan strategis masih dipengaruhi tekanan eksternal, termasuk intervensi politik dari unsur pemerintah daerah selaku pemegang saham, yang berpotensi menghambat profesionalisme manajemen.

5. Fairness (kewajaran)

Kewajaran, Perumda Tuah Sekata telah berupaya memberikan layanan kepada seluruh segmen pelanggan, namun mekanisme penanganan pengaduan yang belum optimal menyebabkan sebagian

pelanggan merasa tidak mendapatkan respons yang memadai.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Nanda et al. (2024) yang menyatakan bahwa implementasi GCG pada BUMD di daerah masih terkendala oleh kapasitas SDM dan budaya organisasi yang belum mendukung. Penguatan kapasitas internal dan reformasi manajerial menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola yang baik dan berkelanjutan (Ningrum et al., 2023).

SIMPULAN

Implementasi *Good Corporate Governance* pada Perumda Tuah Sekata Kabupaten Pelalawan ditinjau dari lima prinsip TARIF belum berjalan secara optimal. Prinsip transparansi terkendala minimnya digitalisasi informasi; akuntabilitas belum didukung mekanisme pertanggungjawaban yang konsisten; responsibilitas masih dibayangi tingginya frekuensi gangguan layanan; independensi terganggu intervensi politik; dan kewajaran belum terwujud merata bagi seluruh pelanggan.

Selanjutnya Secara keseluruhan, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa implementasi GCG di Perumda Tuah Sekata berada pada tahap yang dapat dikategorikan sebagai 'penerapan awal', di mana prinsip-prinsip GCG telah mulai diterapkan secara formal namun belum terinternalisasi secara menyeluruh dalam budaya organisasi dan praktik operasional sehari-hari. Kesenjangan antara aspek formal dan substansial inilah yang menjadi tantangan utama yang perlu diatasi dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang benar-benar baik dan efektif.

Implikasi dari temuan ini adalah perlunya pendekatan perbaikan yang bersifat holistik, tidak hanya berfokus pada pembenahan satu atau dua prinsip saja, melainkan pada penguatan seluruh

ekosistem tata kelola secara bersamaan. Penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan GCG yang terstruktur harus berjalan seiring dengan perbaikan sistem informasi dan modernisasi infrastruktur. Di sisi lain, komitmen pemerintah daerah selaku pemegang saham untuk memberikan ruang otonomi yang lebih besar bagi manajemen Perumda Buah Sekata dalam pengambilan keputusan strategis juga menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya independensi yang sesungguhnya. Tanpa kombinasi perbaikan internal dan dukungan eksternal yang konsisten, upaya penerapan GCG di Perumda Buah Sekata akan terus menghadapi hambatan yang bersifat struktural dan sulit diatasi dalam jangka pendek.

Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem informasi publik berbasis digital, penyusunan mekanisme pengaduan yang terstandarisasi, peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan GCG berkala, serta penguatan independensi direksi dari tekanan politik demi terwujudnya pelayanan listrik yang berkualitas bagi lebih dari 13.000 pelanggan Perumda Buah Sekata.

DAFTAR PUSTAKA

- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). (2006). Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. Jakarta: KNKG.
- Nanda, et al. (2024). Implementasi Good Corporate Governance pada Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 45-62.
- Ningrum, et al. (2023). Reformasi Manajerial BUMD dan Penerapan GCG. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*, 8(2), 112-128.
- Nurohimah, et al. (2023). Tantangan Implementasi GCG pada BUMD di Indonesia. *Jurnal Manajemen Publik*, 5(1), 78-94.
- Pratama, & Wijaya. (2022). Ketersediaan Energi Listrik dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Jurnal Ekonomi Regional*, 10(2), 33-49.
- Rusli, et al. (2022). Dinamika Ekonomi Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 7(1), 15-30.
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance & Good Corporate Governance* (Edisi 3). Bandung: CV Mandar Maju.
- Sendjaja, et al. (2024). Penerapan GCG pada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dan Dampaknya terhadap ROA. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 15(1), 55-71.
- Suwandi Ng. (2024). *Tata Kelola Perusahaan Daerah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Zatira, et al. (2023). Transparansi Informasi dan Kepercayaan Publik pada BUMD. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(3), 200-215.